



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 Maret 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas terkait Kawasan Otarita Batam
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 14 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau C. Ketua Kadin Kota Batam

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua Kadin Kota Batam, agenda Membahas terkait Kawasan Otarita Batam, pada hari Selasa, 12 Maret 2019, dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh KADIN Provinsi Kepulauan Riau dan KADIN Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Komisi II DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai *ex officio* Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
3. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status *Free Trade Zone* menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya.
4. Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2019
KETUA RAPAT

TTD

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419